

## Ideologi dan Strategi Gerakan Filantropi Islam: Studi Kasus Hilal Merah Indonesia

Fahlesa Munabari

fahlesa.munabari@president.ac.id

International Relations Departement, School of Humanities, President University

DOI: <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14821>

---

### Abstract

This article discusses the emergence, activities, and the ways in which Hilal Merah Indonesia (HILMI) mobilizes its resources. HILMI is the autonomous philanthropic division of Front Pembela Islam (FPI) whose activities are focused on delivering humanitarian assistance to beneficiaries ranging from those suffering from natural disasters to those living in severe poverty. A growing body of literature has investigated faith-based organizations that provide humanitarian services in Indonesia such as Dompet Dhuafa, Muhammadiyah (Lazismu), as well as Nahdlatul Ulama's (Lazisnu). However, little attention has been paid to the social and humanitarian activities of Islamic radical movements in the country, such as the FPI. This article aims to address this literature gap. It used a case study approach to obtain primary data as well as a comprehensive understanding of HILMI. The primary data collection was carried out through field observations which were mostly carried out at the HILMI secretariat office in the Kalibata area, South Jakarta, DKI Jakarta. Interviews were conducted with key HILMI informants and a number of FPI officials. This study also used secondary data such as scholarly literature and news articles. The article opens up with the genesis and resource mobilization strategy of FPI. Through the lens of social movement theory, it then analyzes the emergence and resource mobilization strategy of HILMI. It demonstrates how the informal, loose, and flexible structure and culture of its parent organization, FPI, is reflected in the ways in which HILMI engages in the provision of humanitarian assistance in the country.

### Abstrak

Artikel ini membahas kemunculan, aktivitas, dan strategi Hilal Merah Indonesia (HILMI) memobilisasi sumber daya organisasinya. HILMI merupakan divisi filantropi otonom dari Front Pembela Islam (FPI) yang kegiatannya difokuskan pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada para penerima bantuan mulai dari mereka korban bencana alam hingga mereka yang hidup dalam kemiskinan. Telah banyak Literatur yang mengkaji organisasi berbasis agama yang memberikan layanan kemanusiaan di Indonesia seperti Dompet Dhuafa, Muhammadiyah (Lazismu), serta Nahdlatul Ulama (Lazisnu). Namun, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada kegiatan sosial dan kemanusiaan dari gerakan radikal Islam di negara ini, seperti FPI. Artikel ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan literatur ini. Studi Ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan data primer serta pemahaman HILMI yang menyeluruh. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan yang sebagian besar dilakukan di kantor sekretariat HILMI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan kunci HILMI dan pegurus FPI. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur ilmiah dan artikel-artikel berita. Artikel ini diawali dengan asal mula dan strategi mobilisasi sumber daya FPI. Menggunakan teori gerakan sosial, artikel ini kemudian menganalisis kemunculan dan strategi mobilisasi sumberdaya HILMI. Artikel ini menunjukkan bagaimana struktur dan budaya organisasi induknya, yakni FPI, yang informal, longgar, dan fleksibel tercermin dari aktivitas-aktivitas HILMI dalam pemberian bantuan kemanusiaan di Indonesia.

---

### Keywords

*Indonesian Red Crescent, Islamic Movements, Social Work, Islamic Philanthropy, Islamic Charity.*

### Article History

Received December, 28, 2020

Revised March 19, 2021

Accepted April 28, 2021

Published May 24, 2021

### Corresponding Author

Fahlesa Munabari.  
Jababeka Education  
Park. Jl. Ki Hajar  
Dewantara RT 2 RW  
4. Mekarmukti,  
Cikarang Utara,  
Bekasi, Jawa Barat  
17530

## Pendahuluan

Keterbatasan kapasitas negara dalam menghadirkan jaminan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan penanggulangan pasca bencana alam bagi warganya telah mendorong kemunculan sejumlah organisasi berbasis agama (*faith-based organizations*) untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan bencana alam di Indonesia. Pasca bencana Tsunami Aceh tahun 2004, sejumlah organisasi amal berbasis agama, kelompok Islam radikal, dan lembaga pendidikan swasta mengemuka sebagai agen alternatif dalam kegiatan sosial-kemanusiaan serta tanggap bencana alam melalui pengelolaan dan zakat, infaq, dan sedekah (Telford & Cosgrave, 2007). Organisasi-organisasi seperti banyak bermunculan di Indonesia. Beberapa contoh dari organisasi tersebut adalah Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah pelopor lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh seorang wartawan harian Republika pada tahun 1993 di Jakarta yang hadir dengan program-program pengentasan kemiskinan, seperti pemberian beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu, penyediaan klinik kesehatan gratis hingga bantuan keuangan berbasis Islam untuk mendorong lahirnya para wirausahawan Muslim (Helmanita, 2006; Sakai, 2012). Selain organisasi amal dan kemanusiaan seperti Dompot Dhuafa, sejumlah gerakan Islam radikal atau revivalis seperti Front Pembela Islam (FPI) juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam (Republika, 2018). Bahkan, gerakan Islam transnasional yang bertujuan mendirikan Khilafah Islam di Indonesia yang telah dibubarkan pemerintah Presiden Jokowi pada tahun 2017, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), juga tercatat berpartisipasi dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana seperti di Aceh pasca Tsunami 2004 (Nurdin, 2015), meskipun gerakan ini secara ideologi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI (Ahnaf, 2009; Munabari et al., 2020).

Posisi FPI dalam lanskap sosio-politik Indonesia menjadi unik, karena berpartisipasi dalam dua kegiatan yang dianggap cukup berlawanan secara bersamaan, yakni sebagai gerakan filantropis dan sebagai gerakan sosial yang secara aktif terlibat dalam aksi kolektif mengkritik pemerintah dan kelompok atau organisasi lain yang dianggap merugikan kepentingan agama dan umat Islam (Bagir, 2010). Sebagai gerakan filantropis berbasis Islam, FPI, melalui sayap organisasinya yang bernama Hilal Merah Indonesia (HILMI), aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial-kemanusiaan dan tanggap bencana sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga sosial-kemanusiaan lain seperti, sebagaimana disebut di atas, Dompot Dhufa dan Rumah Zakat. Semangat yang melatarbelakangi aktivitas filantropis FPI tersebut tentu tidak berbeda dengan lembaga-lembaga filantropis berbasis agama lainnya, yakni menjalankan perintah agama Islam untuk berbuat kebaikan dan menolong terhadap sesama. Kebangkitan lembaga-lembaga sosial-kemanusiaan berbasis Islam tersebut di Indonesia tidak lepas dari kebangkitan gerakan dan dakwah Islam pada umumnya yang terjadi di awal tahun 1980-an yang didominasi oleh kegiatan dakwah di kampus-kampus di kota-kota besar di Indonesia melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK) (Rahmat, 2005).

Kebangkitan tersebut tidak saja terjadi di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga secara umum pada level masyarakat dan negara di akhir era Presiden Suharto dengan beragam kebijakannya seperti berdirinya lembaga *think tank* Islam yang mendapat dukungan dari pemerintah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dicabutnya larangan berjilbab bagi siswa sekolah, dikeluarkannya undang-undang berbasis Islam seperti undang-undang mengenai

zakat dan lembaga keuangan Syariah (Liddle, 1996). Berdirinya Dompot Dhuafa pada awal tahun 1990-an sebagai pionir lembaga filantropis Islam juga tidak terlepas dari fenomena kebangkitan Islam di tanah air, bukan sebagai organisasi berbasis Islam yang bertujuan politis atau mengemban misi dakwah semata, melainkan fokus kepada agenda-agenda sosial-kemanusiaan dan kesejahteraan umat Islam, termasuk pengentasan kemiskinan yang ketika itu, bahkan sampai saat ini, menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang berat.

Jika kita melihat ruang lingkup aktivitas sosial-kemanusiaan yang dilakukan oleh FPI melalui sayap organisasi HILMI ini dari sudut pandang organisasi massa Islam besar di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, apa yang dilakukan FPI ini tidaklah mengejutkan. Sebagai organisasi massa Islam moderat besar di Indonesia yang sudah ada di tanah air bahkan sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, kedua organisasi ini memang memfokuskan aktivitasnya di jalur dakwah Islam dan sosial-kemanusiaan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah dengan slogan Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) sedari awal kelahirannya memang ditujukan untuk menyediakan rakyat Indonesia dengan bantuan sosial dan kemanusiaan, terutama dalam bentuk kesehatan dan pendidikan (Fauzia, 2017). Hal serupa juga dilakukan NU meskipun pada era Orde Lama sempat terjun ke dalam politik praktis melalui Partai NU yang berkontestasi pada Pemilu 1955. Memiliki ribuan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, peran NU pada kenyataannya tidak hanya berkuat dalam layanan pendidikan, tetapi juga dalam bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi komunitas pesantren sekaligus juga warga di sekitar pesantren tersebut. Dalam konteks kekinian, kedua organisasi ini juga memiliki lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah masing-masing: Lazismu untuk Muhammadiyah dan Lazisnu untuk Nahdlatul Ulama (Baidhawiy, 2015; Latief, 2010). Namun, FPI berbeda secara signifikan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pertama, FPI masuk dalam kategori gerakan sosial revivalis Islam yang dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas aksi kolektifnya (*collective action*) terutama yang dilakukan dalam bentuk aksi protes massa. Dianggap revivalis karena FPI berkomitmen untuk menegakkan aturan dan prinsip Islam (syariah) di ruang publik melalui upaya pencegahan kemungkaran (*nahi munkar*) melalui isu-isu protes yang diusungnya selama ini seperti penolakan pornografi dan pornoaksi, tuntutan penutupan tempat-tempat maksiat yang menjajakan minuman keras dan prostitusi hingga penolakan ideologi dan praktik Islam liberal dan Islam yang dianggap menyimpang seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Ahmadiyah Indonesia. Istilah revivalis didefinisikan sebagai keyakinan terhadap perlunya upaya untuk kembali menghidupkan ajaran dan prinsip agama Islam tidak saja pada ranah individu (*individual sphere*) tetapi juga ranah publik (*public sphere*) (Esposito & Voll, 2001). FPI dianggap sebagai gerakan sosial karena memiliki karakteristik yang mewakili gerakan sosial (*social movement*) menurut ilmuwan sosial yang mengkaji gerakan sosial. Terdapat tiga karakteristik gerakan sosial: 1) mengkampanyekan isu-isu protes yang dianggap layak untuk diperjuangkan bagi gerakan tersebut; 2) melakukan bentuk-bentuk aksi kolektif seperti demonstrasi massa, pertemuan akbar, pernyataan pers, petisi, dan sejenisnya; 3) keterwakilan publik terhadap komitmen, soliditas, dan misi yang diperjuangkan gerakan tersebut (Tarrow, 1998; Tilly, 2004).

Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis HILMI sebagai sayap organisasi FPI, mengingat sejauh ini belum ada literatur atau hasil penelitian yang meneliti HILMI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur dan wawancara terhadap tokoh-tokoh HILMI dan FPI. Pendekatan gerakan sosial digunakan sebagai pisau analisis untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik dalam kerangka ilmu sosial terhadap HILMI. Teori gerakan sosial lazim digunakan untuk menganalisis dinamika aktivitas dan organisasi organisasi sosial atau keagamaan yang termasuk dalam kategori gerakan sosial yang telah disebutkan diatas. Artikel ini diawali dengan deskripsi latar belakang kemunculan dan sumber daya organisasi FPI sebagai induk organisasi HILMI. Setelah itu dilanjutkan dengan deskripsi dan analisis terhadap sejarah, aktivitas, ruang lingkup, dan program, serta sumber daya organisasi HILMI. Artikel ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, literatur, dan pemahaman mengenai dinamika sebuah gerakan sosial revivalis Islam dalam konteks era reformasi di Indonesia yang juga aktif berkecimpung di dalam aktivitas sosial-kemanusiaan selain aktivitas gerakan sosialnya seperti demonstrasi massa, pertemuan publik, dan sweeping. Artikel ini menunjukkan bahwa aktivitas aksi kolektif dari sebuah gerakan revivalis Islam dalam lanskap sosio-politik Indonesia kontemporer tidak selalu berkuat dalam aksi-aksi gerakan sosial seperti demonstrasi massa saja yang mengusung tema-tema penegakan syariah atau pendirian khilafah Islam, melainkan juga dalam hal sosial-kemanusiaan dan tanggap bencana.

### **Front Pembela Islam**

FPI didirikan beberapa bulan setelah rezim Presiden Suharto (1967-1998) jatuh, yakni pada 17 Agustus 1998 di Jakarta. Sejarahnya bermula ketika sejumlah ulama berpengaruh berkumpul di Pesantren Al-Umm, Jakarta untuk memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membahas dan mencari solusi bagi masalah-masalah multidimensi yang muncul seperti konflik sektarian yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, krisis ekonomi, dan ketidakadilan sosial yang massif. Permasalahan tersebut diyakini FPI sebagai dampak dari kemampuan negara yang menurun di era transisi demokrasi pada saat itu dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut secara efektif. Banyak dari kalangan umat Islam, khususnya yang memiliki latar belakang pesantren dan habaib (bentuk jamak dari “habib” yang secara umum digunakan di Indonesia untuk menyebut orang, khususnya para pendakwah atau pemuka agama Islam, yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur cucunya Hasan bin Abi Thalib (Slama, 2014). Habib Rizieq Shihab dan Kiai Misbahul Anam serta beberapa pejabat militer papan atas menghadiri pertemuan itu (Jahroni, 2008).

Pertemuan tersebut menyepakati bahwa dalam rangka mencari solusi krisis multidimensional tersebut, umat Islam perlu memainkan peran aktif dan membutuhkan sebuah organisasi. Atas dasar inilah pertemuan tersebut memutuskan untuk mendirikan FPI (Jahroni, 2008). Dengan kehadiran pejabat militer pada acara ini, dibarengi dengan kehadiran para jenderal militer pada ulang tahun pertama FPI di tahun berikutnya, terbentuklah spekulasi bahwa militer adalah pelaku utama yang merencanakan berdirinya FPI. Untuk menganalisis spekulasi ini, kita perlu memperhatikan tidak hanya dinamika relasi kuasa antara rezim Presiden Suharto dan militer pada tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi juga ideologi dari gerakan ini.

Sebagai gerakan revivalis Islam, ideologi yang diyakini oleh FPI tidak berbeda dengan gerakan revivalis Islam lain seperti HTI, MMI, dan FUI. Gerakan-gerakan ini menjadikan Islam sebagai ideologi utama mereka. Mereka pun sepakat untuk mengupayakan Islam sebagai norma dan prinsip hidup yang diterapkan di ruang publik masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan mengenai bagaimana dan sejauh apa norma dan prinsip Islam tersebut (syariah) diterapkan di Indonesia. Mereka berbeda pendapat mengenai sejumlah isu seperti apakah negara Islam atau khilafah perlu didirikan di Indonesia, bagaimana status hukum

Islam dalam hal berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia, dan sejumlah isu-isu lainnya. Di awal berdirinya, FPI menyatakan tujuannya untuk mengupayakan pemberlakuan Piagam Jakarta di Indonesia (Jahroni, 2008).

Namun, dalam praktiknya, publik lebih banyak melihat aksi kolektifnya berupa aksi *sweeping* dan demonstrasi massa. Semboyan FPI yang mendasari aktivitas gerakannya adalah “amar ma’ruf dan nahi munkar” yang diambil dari Al-Quran dan berarti perintah untuk “menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran” di dalam kehidupan bermasyarakat. Semboyan “amar ma’ruf” diterapkan FPI dalam sejumlah aktivitasnya yang ditujukan untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa bermanfaat bagi orang banyak seperti aktivitas sosial-kemanusiaannya melalui sayap organisasinya yang bernama HILMI. Sementara itu, semboyan “nahi munkar” ditujukan untuk mencegah kemaksiatan di masyarakat. Tempat-tempat yang tidak Islami seperti tempat pelacuran dan diskotek adalah sebagian contoh dari tempat-tempat yang tidak Islami tersebut. Tujuan kegiatan *sweeping* FPI lebih diarahkan untuk mendorong para pemilik tempat-tempat tersebut untuk menutup bisnis mereka, khususnya selama bulan puasa Ramadhan. Demonstrasi massa adalah jenis aksi kolektif FPI lainnya dan mulai sering dilakukan FPI, terutama setelah bergabung dengan FUI pada tahun 2005.

### **Strategi Mobilisasi Dukungan**

Pola rekrutmen FPI sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial keagamaan para pendiri dan pemimpinnya. Hampir semua pendiri FPI adalah para habaib dan kyai yang pengikut-pengikutnya tidak berbasis di kampus, melainkan di pesantren. Hal ini berbeda dengan pola penyebaran dakwah awal gerakan HTI dan Jemaah Tarbiyah yang merupakan embrio Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang tersebar di banyak kampus di Indonesia (Rahmat, 2005). Para habaib di Indonesia sering mengadakan pengajian di masjid-masjid di sekitar kediaman mereka, sementara para kyai memiliki pengaruh dan dukungan yang kuat dari para santri mereka di pondok pesantren. Baik habaib maupun kyai menempati kedudukan sosial-keagamaan yang tinggi dan dihormati di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para santri (Dhofier, 1980). Oleh karena itu, banyak anggota dan simpatisan FPI berasal dari mereka yang secara rutin menghadiri pengajian yang digelar para habaib dan dari para santri pondok-pondok pesantren yang kyainya adalah pemimpin atau anggota berpengaruh di FPI.

Karena para habaib dan kyai adalah unsur dominan yang membentuk kepemimpinan FPI, pola kepemimpinan yang menjadi ciri khas dari FPI adalah jenis kepemimpinan yang disebut oleh Max Weber sebagai kepemimpinan karismatik (*charismatic leadership*) (Adair-Toteff, 2005). Karisma pendiri dan pemimpin utama FPI, Rizieq Shihab, inilah yang membantu melanggengkan aktivitas-aktivitas FPI. Rizieq lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1965 dan belajar di sekolah dasar dan menengah umum. Namun, hal ini tidak menghalangi Rizieq untuk mempelajari pelajaran-pelajaran agama Islam di luar jam sekolah (Suprana, 2014). Bercita-cita menempuh pendidikan lanjut di Timur Tengah, Rizieq mengikuti program diploma bahasa Arab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) dan melanjutkan studinya di Fakultas Hukum, Universitas Raja Saud, Riyadh, Arab Saudi (Jahroni, 2008).

Dalam ranah gerakan sosial, Rizieq disebut dengan “penggerak gerakan” (*movement entrepreneur*) yang berperan penting dalam sebuah gerakan sosial untuk melanggengkan aktivitas-aktivitasnya seperti demonstrasi massa, pertemuan publik, pernyataan pers, dan lain sebagainya

serta untuk memobilisasi dukungan guna merealisasikan aktivitas-aktivitas tersebut (Zald & McCarthy, 1987). FPI mengakui bahwa untuk menopang kegiatan-kegiatan dan program-program FPI di masa depan, alih-alih memilih pemimpin tertinggi yang baru, kedudukan Rizieq di FPI bahkan ditingkatkan menjadi Imam Besar berdasarkan keputusan bulat Kongres Ketiga FPI yang digelar di Jakarta pada Agustus 2013. Kedudukan Ketua Umum FPI yang ditinggalkan Rizieq kemudian, pada saat itu, diduduki oleh Muhsin al-Attas, salah seorang tokoh senior FPI yang juga keturunan Arab dan memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW (Maarif, 2013).

Seperti gerakan Islam revivalis lainnya, FPI mengandalkan sumbangan dari anggota dan simpatisannya. Namun, pada kenyataannya yang lebih sering terjadi, iuran bulanan anggota tidak dapat dikumpulkan, terutama karena abainya anggota untuk membayar iuran tersebut secara teratur (Bamu'min, 2013). Di samping itu, meskipun FPI memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, gerakan ini tidak cukup mampu menyediakan para anggotanya dengan program-program pelatihan yang terorganisir dengan baik. Hal ini terutama disebabkan karena kurangnya sumber daya organisasi dan kesadaran mengenai pentingnya keberadaan program-program pelatihan tersebut. Akibatnya, sejak awal kemunculannya di ranah publik pada tahun 1998, tercatat berbagai insiden yang melibatkan anggota FPI dalam bentrokan dengan warga sipil, anggota organisasi lain.

Sebagai gerakan revivalis Islam di Indonesia, FPI memiliki karakteristik yang berbeda dengan gerakan revivalis Islam lainnya seperti HTI, MMI, dan FUI. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak terjangan FPI sejak kelahirannya pada tahun 1998 selalu identik dengan kekerasan melalui aksi-aksi sweeping tempat-tempat tidak Islami seperti diskotek, tempat prostitusi, dan sejenisnya serta aksi-aksi demonstrasi massanya. Aksi sweeping dan demonstrasi massa yang dilakukannya selama ini tidak dapat dipungkiri kerap kali memosisikan FPI berseberangan dengan pemerintah. Dengan kata lain, FPI menjalankan perannya sebagai gerakan sosial dengan melakukan kritik secara berkelanjutan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, isu-isu yang diangkat FPI sebagian besar adalah isu yang dianggapnya merugikan ajaran Islam dan umat Islam, seperti misalnya kemaksiatan di masyarakat dalam bentuk pornografi dan pornoaksi, paham liberalisme, bahkan dewasa ini sampai ke ranah politik seperti menuntut mundurnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada kurun waktu 2014 - 2017 yang kemudian memicu serangkaian demonstrasi "Aksi Bela Islam 212". Namun, alih-alih aksi demonstrasi massanya yang kerap mengkritik pemerintah dan seringkali berakhir ricuh, FPI di lain kesempatan bersedia menjalin kerja sama dengan pemerintah. Sebagai gerakan revivalis Islam yang mendorong implementasi nilai-nilai atau ajaran Islam di ranah publik, apa yang dilakukan FPI ini berbeda dengan gerakan revivalis Islam seperti HTI. Meskipun sama-sama gerakan revivalis Islam, HTI selalu mengambil sikap oposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah Indonesia melalui serangkaian aksi massanya. Hal disebabkan karena HTI sejatinya berupaya untuk mendelegitimasi pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan untuk menggantinya dengan negara Khilafah Islamiyah. Sehingga, meskipun HTI pernah tercatat memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban Tsunami di Aceh pada tahun 2005 serta bantuan kemanusiaan lainnya (Nurdin, 2015), gerakan ini melakukan aksi kemanusiaan ini secara mandiri tanpa bantuan atau kerja sama

dengan pemerintah serta tidak pernah tercatat pernah bekerjasama dengan pemerintah untuk program-program sosial dan kemanusiaan.

Kontras dengan HTI, FPI pernah tercatat menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2012 yang diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) untuk proyek sosial yang disebut “Bedah Rumah” yang bertujuan merenovasi tempat tinggal kaum miskin yang tidak layak huni di sejumlah daerah di Indonesia. Selain itu, melalui sayap organisasi Hilal Merah Indonesia-nya (HILMI), FPI merespon meningkatnya musibah bencana alam dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade belakangan ini dengan mengirimkan misi tanggap bencana dan kemanusiaannya, seperti di Yogyakarta selama letusan gunung Merapi pada tahun 2010 dan Sumatra Utara selama letusan merapi gunung Sinabung pada tahun 2010 dan 2013. FPI mengirimkan misi kemanusiaannya untuk membantu korban Tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan Nias pada tahun 2005. Selain itu, gerakan ini juga memberikan bantuan kemanusiaan pada korban banjir musiman di Jakarta serta mendirikan pos-pos siaga bencana banjir (Sahroji, 2013)

Perbedaan yang mencolok dari dua sisi aktivitas FPI yang sering berposisi dengan pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat melalui aksi-aksi *sweeping* dan demonstrasi massanya, namun juga tidak pantang dalam bekerjasama dengan pemerintah untuk aksi-aksi tanggap bencana dan kemanusiaannya inilah yang disebut oleh Zainal Abidin Bagir dan Kawan-kawan dalam Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010 dengan “Dua Wajah FPI” yang saling bertolakbelakang. Wajah pertama FPI disebut *Uncivil Face* yang dapat dimaknai dengan “Wajah Tidak Baik”. Hal ini termanifestasikan dari aktivitas-aktivitas FPI seperti *sweeping* dan demonstrasi massa yang kerap berakhir ricuh. Sementara itu “Wajah Baik” atau *Civil Face* dari FPI direpresentasikan oleh aktivitas-aktivitas tanggap bencana, sosial, dan kemanusiaan yang dilakukannya selama ini seperti tersebut diatas (Bagir et al., 2010; Woodward et al., 2014). Sayangnya, laporan ini tidak membahas dengan detail manifestasi atau implementasi dari “Civil Face” FPI ini dan belum ada ada studi yang mengkaji aktivitas *Civil Face* FPI ini melalui sayap organisasi HILMI-nya. Untuk itu, uraian mengenai implementasi *Civil Face* FPI melalui sayap organisasinya yang bernama HILMI akan dikaji pada bagian pembahasan.

## Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. HILMI adalah objek dari penelitian ini. Metode studi kasus digunakan untuk mendapatkan data primer serta sudut pandang yang komprehensif mengenai HILMI. Metode pengambilan data primer dilakukan melalui observasi lapangan yang sebagian besar dilakukan di kantor sekretariat HILMI di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta serta melalui wawancara dengan para informan kunci HILMI diantaranya terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat HILMI. Selain itu, karena HILMI merupakan bagian dari FPI, maka wawancara juga dilakukan terhadap sejumlah pengurus FPI. Data sekunder berupa literatur penelitian seperti artikel jurnal, buku, dan berita didapatkan untuk memperkaya informasi mengenai HILMI sekaligus mengkonfirmasi dan memvalidasi keterangan yang didapat dari para informan HILMI. Literatur mengenai gerakan sosial digunakan sebagai referensi sekaligus pisau analisis studi ini dalam mengaitkan HILMI sebagai organisasi gerakan filantropi Islam ke dalam ruang lingkup studi gerakan sosial atau gerakan filantropi dalam skala yang lebih besar.

## Sejarah Awal Hilal Merah Indonesia (HILMI)

Lembaga otonom dalam FPI yang tidak ada adalah gerakan revivalis Islam lainnya seperti HTI dan MMI, adalah Hilal Merah Indonesia (HILMI). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan lembaga ini secara formal didirikan sebagai sayap organisasi FPI. Namun, kiprah FPI untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mitigasi pasca bencana alam dan kemanusiaan sudah dilakukan gerakan ini sejak lama. Setidaknya tercatat sejak FPI mengirimkan misi kemanusiaannya dalam merespon bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2004. Menurut perspektif Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structures*), kemunculan HILMI sebagai gerakan filantropi Islam di bawah bendera FPI di awal tahun 2000-an tidak bisa dilepaskan dari atmosfer politik di Indonesia pasca rezim Presiden Suharto yang ditandai dengan menurun drastisnya tingkat represi dan otoritarianisme sehingga menjamin kebebasan berorganisasi dan penyampaian aspirasi (Meyer & Minkoff, 2004).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HILMI saat ini dipegang oleh Ali al-Hamid. Posisi Ketua HILMI ini telah diemban Ali sejak tahun 2008 yang juga merupakan titik awal perkembangan HILMI sebagai sayap organisasi otonom FPI ke arah yang lebih terorganisir dan dinamis dalam merespon meningkatnya kebutuhan terhadap program tanggap bencana alam akibat beragam bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Kepemimpinan Ali di HILMI bermula dari kedekatannya dengan Imam Besar DPP FPI, Rizieq Shihab pada tahun 2008 ketika Rizieq mendekam di penjara untuk menjalani vonis pengadilan selama sekitar 1,5 tahun pasca Insiden Monas 1 Juni 2008 (Al-Hamid, 2018). Sebelum mengenal sosok Rizieq lebih dalam, Ali mengakui bahwa dirinya sempat tidak bersimpati dengan Rizieq dikarenakan pemberitaan negatif media massa mengenai sepak terjang FPI yang identik dengan kekerasan. Namun, lambat laun, Ali justru mengagumi sosok Rizieq yang diyakininya tidak seperti apa yang diberitakan di media selama ini. Kekaguman akan sosok Rizieq inilah yang tidak saja dirasakan oleh Ali al-Hamid, tetapi juga oleh mayoritas pengurus, anggota, dan simpatisan FPI. Hal ini menguatkan argumentasi tipe kepemimpinan karismatik Max Weber yang sesuai untuk klasifikasi kepemimpinan Rizieq Shihab di FPI (Adair-Totef, 2005). Berbekal kekaguman ini, Ali kemudian mengunjungi Rizieq secara rutin di penjara untuk menimba ilmu agama dan berdiskusi mengenai aspek organisasi dan program kerja FPI ke depan. Dalam diskusi itu, Ali sempat menceritakan aksi sosial penanganan banjir di kediamannya di daerah Matraman, Jakarta Timur yang sering dilakukannya bersama teman-teman kepada Rizieq. Dari situlah kemudian Rizieq mempercayakan Ali untuk memimpin dan mengembangkan HILMI. Ali inilah yang kemudian menjadi apa yang para ilmuwan gerakan sosial sebut dengan *movement entrepreneur* HILMI yang bertanggungjawab menjadi motor penggerak segala aktivitas organisasi ini (Diani & Della Porta, 1999:149).

Menurut Ali al-Hamid, sebelum mengemban kepemimpinan HILMI pada tahun 2008, aktivitas HILMI banyak diarahkan dan diorganisir oleh almarhum Joserizal, seorang dokter dan aktivis sosial sekaligus pendiri lembaga medis dan kemanusiaan Mer-C (*Medical Emergency Rescue Committee*). Dengan pola pemilihan Ali al-Hamid sebagai Ketua HILMI pada tahun 2008 dan dr. Joserizal sebagai penasihat HILMI dan pernah menjabat Ketua Departemen Kemanusiaan FPI, hal ini, menandakan tingkat keterbukaan FPI yang tinggi dalam pola rekrutmen anggota atau pengurusnya (Al-Hamid, 2018). Dengan kata lain, FPI tidak segan untuk merekrut orang-orang yang memiliki simpati atau komitmen terhadap perjuangan Islam di Indonesia sebagai pengurus



tanpa harus melewati kriteria seleksi yang ketat seperti yang dilakukan oleh gerakan revivalis Islam HTI. Hal ini sangat berbeda dengan pemilihan Ali al-Hamid untuk mengemban posisi Ketua sayap organisasi HILMI di tahun yang relatif sama, tahun 2008, dengan perkenalan Ali dengan FPI dan Rizieq Shihab. Begitu juga dengan dr. Joserizal sebagai Ketua Departemen Kemanusiaan FPI meskipun yang bersangkutan memiliki afiliasi lain sebagai pendiri dan pembina lembaga medis dan kesehatan Mer-C.

### **Aktivitas, Ruang Lingkup, dan Program HILMI**

HILMI memiliki ruang lingkup aktivitas di bidang sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana. Sejauh ini HILMI belum memutuskan untuk berkontribusi dalam memberikan bantuan keuangan secara islami layaknya lembaga-lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia seperti BMT (Baitul Mal wat Tamwil) (Sakai, 2010). Meskipun keinginan untuk membantu menyalurkan keuangan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan prinsip Islam sempat terbersit di kalangan pengurus HILMI, menunda keinginan tersebut mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan oleh sayap organisasi FPI ini jika juga harus menekuni aktivitas penyaluran kredit atau keuangan secara islami, seperti kompleksitas perizinan dan ketidaksiapan sumber daya organisasi (Purnomo, 2018).

Ruang lingkup sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana yang diterapkan HILMI memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari membantu renovasi rumah tak layak huni, tanggap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, membuat sumur bagi warga yang membutuhkan, pembagian sembako, pembagian masker dan penyemprotan disinfektan selama wabah Covid-19 melanda hingga mengirimkan misi bantuan untuk komunitas Muslim Rohingya di Myanmar (Al-Hamid, 2018).

Karakter HILMI sebagai sayap organisasi FPI tentu tidak bisa dilepaskan dari struktur organisasi FPI. Keberadaan HILMI di daerah-daerah di Indonesia mengikuti struktur di FPI dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai perwakilan di tingkat provinsi dan DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) di tingkat kota atau kabupaten. Keanggotaan dan kepemimpinan HILMI juga diambil dari anggota FPI, terutama dari LPI (Laskar Pembela Islam). Anggota-anggota LPI ini pada perkembangannya diandalkan menjadi garda depan dalam aktivitas-aktivitas aksi kolektif FPI, seperti demonstrasi massa. Sebagai garda depan dalam aksi kolektifnya, orang-orang LPI ini diandalkan bukan dalam hal intelektualitas, kemampuan kepemimpinannya atau penguasaan dalam pengetahuan agama Islam. Mereka lebih dibutuhkan untuk mampu mengeksekusi aktivitas-aktivitas lapangan yang dibutuhkan ketika aksi demonstrasi massa maupun aktivitas-aktivitas sosial-kemanusiaan dan tanggap bencana HILMI seperti bedah rumah, pendirian posko-siaga banjir, evakuasi dampak letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Koordinator Lapangan DPP HILMI yang menjadi informan dalam penelitian ini, Eko Purnomo, sebelumnya bertugas sebagai anggota di LPI sejak tahun 2002. Posisinya di HILMI sebagai Koordinator Lapangan menjadi strategis karena akan memudahkan mobilisasi relawan-relawan HILMI yang berasal dari LPI untuk implementasi program-program sosial-kemanusiaan dan tanggap bencananya.

Jenis program bantuan HILMI dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana memiliki bentuk yang sangat beragam. Sejumlah program favorit dan berulang yang dilakukan HILMI diantaranya adalah mendirikan posko siaga banjir, renovasi rumah tidak layak huni,

pembagian daging kurban, pembagian paket sembako, pengobatan gratis, bantuan untuk warga Gaza di Palestina, warga Rohingya di Myanmar, dan lain sebagainya. Selain didorong oleh rasa solidaritas sesama Muslim, bantuan yang ditujukan terhadap warga Muslim di luar negeri, dalam hal ini kepada warga Gaza dan Rohingya, tidak bisa terlepas dari keterkaitan HILMI sebagai bagian tidak terpisahkan dari FPI yang juga seringkali mengangkat isu solidaritas terhadap Palestina dan Rohingya dalam aksi-aksi demonstrasinya (CNN Indonesia, 2017). Namun, tidak semua isu solidaritas sesama warga Muslim di luar Indonesia yang diangkat FPI dapat ditindaklanjuti oleh HILMI. Isu warga minoritas Muslim Uighur di China pernah menjadi isu protes FPI yang mendapat liputan luas di media (CNN Indonesia, 2012). Karena keterbatasan akses dan jaringan yang dimiliki HILMI, pengiriman bantuan ke provinsi Xinjiang, China tidak semudah pengiriman bantuan HILMI ke Gaza, Palestina dan negara-bagian Rakhine, Myanmar (Republika, 2018). Selain itu, keberhasilan penyaluran bantuan HILMI di Palestina dan Myanmar juga merupakan hasil kerja sama dengan lembaga kemanusiaan lain seperti Mer-C, yang telah lama menjalin kerjasama dengan FPI di bidang sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana. Bahkan, seperti disebutkan sebelumnya, pendiri Mer-C mendiang dr. Joserizal pernah menjadi penasihat HILMI dan Ketua Departemen Kemanusiaan FPI.

Meski HILMI mengaku memiliki program rutin dalam bidang sosial-kemanusiaan, seperti membuka posko banjir dan mudik, bakti sosial, bedah rumah, dan lain-lain, (Purnomo, 2018) pada kenyataannya, respon penanganan kebutuhan bantuan sosial-kemanusiaan yang dilakukan HILMI bersifat fleksibel dan spontan. Program rutin HILMI tersebut dapat berjalan bersamaan dengan permintaan bantuan sosial-kemanusiaan yang datangnya bisa sewaktu-waktu atau spontan dari masyarakat yang membutuhkan. Permintaan bantuan spontan tersebut bisa beragam bentuknya, mulai dari permintaan bantuan pengobatan warga yang sakit, permintaan pembuatan sumur bor dari warga yang membutuhkan hingga pembagian masker dan penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan wabah Covid-19 (Al-Hamid, 2018).

HILMI tercatat secara berkala memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina dan komunitas Muslim Rohingya di Myanmar (Hidayatullah, 2018). Namun, program bantuan tersebut tidak memiliki tingkat keberlanjutan (*sustainability*) yang baik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan cakupan dan efektivitas kampanye penggalangan dana HILMI sehingga berpengaruh terhadap jumlah dan keberlanjutan donatur. Keterbatasan kampanye penggalangan dana ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti masih terbatasnya sumber daya manusia di HILMI untuk mengoptimalkan sosialisasi program dan kampanye penggalangan dana. Selain itu, meski HILMI menegaskan bahwa mereka tidak pandang suku, agama, ras, dan golongan dalam menjalankan aktivitas sosial-kemanusiaan (Al-Hamid, 2018), citra FPI sebagai induk organisasi HILMI yang identik dengan kekerasan tidak dapat diterima oleh sebagian kalangan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia (Purnomo, 2018). Di daerah-daerah dimana FPI mendapat penolakan, secara otomatis HILMI juga tidak dapat berdiri dan beraktivitas, karena HILMI secara organisasi menginduk ke FPI (Hasan, 2018). Namun, HILMI secara sadar menerapkan strategi pendekatan sosial-kemanusiaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan organisasi induknya, FPI, ketika melakukan aksi demonstrasi massa.

Narasumber internal FPI menyatakan bahwa HILMI adalah sayap juang FPI yang bersifat otonom. Otonom disini berarti bahwa HILMI diberikan kebebasan oleh FPI untuk mengatur, merancang, dan mengimplementasikan program-program HILMI di bidang sosial, kemanusiaan,

dan tanggap bencana. Dalam konteks ini, HILMI tidak diharuskan melakukan rapat koordinasi rutin dengan FPI terkait dengan program-program HILMI. Bahkan, pada kenyataannya, HILMI jarang melakukan rapat dengan FPI untuk membahas aspek-aspek keorganisasian dan program kerja HILMI. Interaksi organisasi antara HILMI dan FPI normalnya berupa komunikasi atau pelaporan informal mengenai aktivitas-aktivitas sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana HILMI kepada FPI yang biasanya menggunakan media sosial Whatsapp (Sahroji, 2018).

Pola koordinasi dan komunikasi antara HILMI dan FPI yang lebih bersifat informal dan tidak kaku yang disampaikan pengurus DPP FPI tersebut juga selaras dengan pernyataan Ketua HILMI, Ali al-Hamid, ketika ditanya mengenai hal yang sama (Al-Hamid, 2018) Pola tersebut juga berlaku antara DPP HILMI dengan cabang-cabangnya di berbagai daerah di Indonesia yang juga diberi keleluasan untuk menentukan atau merancang program-programnya sendiri termasuk juga dalam hal penghimpunan dana. Budaya organisasi FPI sebagai organisasi induk HILMI yang cenderung fleksibel dan informal dalam hal koordinasi, komunikasi, dan penerapan aturan-aturan organisasi, sebagaimana dibahas sebelumnya, tidak terelakkan mempengaruhi budaya organisasi HILMI. Pola seperti ini sangat berbeda dengan organisasi revivalis Islam seperti HTI yang memiliki budaya organisasi yang ketat, sentralistik/terpusat, dan lebih terorganisir (Munabari, 2010).

### **Sumber Daya Organisasi HILMI**

FPI sebagai gerakan sosial memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan gerakan sosial lain di dunia, termasuk gerakan sosial Islam, yang umumnya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, termasuk sumber daya keuangan. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi setiap gerakan sosial untuk dapat memaksimalkan sumber daya-sumber daya tersebut guna mencapai tujuan gerakan melalui aksi-aksi kolektifnya (McAdam et al., 1996).

Hal ini juga berlaku untuk HILMI. Sumber pendanaan terhadap program-program sayap organisasi FPI ini sepenuhnya berasal dari donasi eksternal. Donasi eksternal ini bisa terdiri dari siapa saja, baik itu relasi pengurus atau anggota HILMI/FPI maupun publik secara umum, selama donasi itu murni ditujukan untuk bantuan sosial-kemanusiaan tanpa ada agenda atau kepentingan politik di belakangnya (Al-Hamid, 2018). Untuk memudahkan penyaluran donasi tersebut, HILMI membuka rekening donasinya kepada publik melalui websitenya.

Dalam hal ini, HTI, MMI, dan FUI tidak berbeda. Mereka juga bergantung kepada donasi untuk membiayai keberlangsungan aktivitas dan program mereka. Namun, berbeda dengan HILMI dan FPI, HTI, MMI, dan FUI memberlakukan iuran keanggotaan rutin terhadap para anggotanya, sehingga dana dari iuran tersebut juga termasuk salah satu sumber keuangan gerakan-gerakan tersebut (Munabari, 2010, 2017, 2018, 2019; Munabari et al., 2020). . HILMI pernah mencoba menerapkan iuran keanggotaan bagi para anggotanya, tetapi tidak berjalan (Al-Hamid, 2018). Hal serupa juga terjadi terhadap FPI yang tidak pernah berhasil menerapkan iuran rutin bagi para anggotanya (Bamu'min, 2013). Ketidakberhasilan ini menjadi bukti akan karakter organisasi FPI, termasuk HILMI, yang tidak ketat dan kurang terorganisir dalam aspek manajemen organisasi, termasuk dalam menegakkan aturan iuran keanggotaan.

Selain sumber daya keuangan, HILMI juga kerap kali memaksimalkan jaringan atau relasi yang dimilikinya. Keberlangsungan penyaluran bantuan sosial-kemanusiaan ke Gaza, Palestina dan Rakhine, Myanmar juga dapat terwujud melalui kerja sama dengan lembaga kemanusiaan lain

seperti MER-C. Sebagaimana disinggung sebelumnya, pendiri MER-C, mendiang dr. Joserizal, sempat menjadi pengurus teras di FPI sebagai Ketua Departemen Kemanusiaan FPI dan Penasihat HILMI. Kerjasama program “Bedah Rumah” antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan FPI/HILMI pada tahun 2012 juga terwujud lantaran kedekatan relasi antara mantan Menteri Sosial RI (2009-2014), Salim Segaf al-Jufri, dengan Riziq Shihab. Keduanya adalah keturunan Hadrami bergelar habib dan para habaib di Indonesia memiliki organisasi komunitas yang mewadahi mereka bernama Rabithah Alawiyah. Bukti kedekatan tersebut juga terlihat dari kedatangan mantan Menteri Sosial tersebut pada acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) FPI di Asrama Haji, Bekasi pada 22 Agustus 2013 untuk memberikan kata sambutan.

Penggunaan situs dan media sosial diantara gerakan sosial saat ini bukan lagi hal yang aneh. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan internet dan media sosial ini memainkan peran penting bagi setiap gerakan sosial, termasuk gerakan revivalis Islam di Indonesia, untuk memaksimalkan dukungan publik guna mewujudkan agenda-agenda aksi kolektifnya (Nisa, 2018). Bagi HILMI, keberadaan situs dan media sosial ini tidak saja berfungsi untuk mengkampanyekan penggalangan dana bagi para donatur, tetapi juga, dan ini yang terpenting, untuk mensosialisasikan implementasi program-program sosial, kemanusiaan, dan tanggap bencana HILMI kepada publik.

Meski HILMI mengklaim bahwa mereka tidak memperdulikan apakah aktivitasnya selama ini diliput media atau tidak, keberadaan website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter tersebut akan membantu menciptakan imaji (*image*) yang positif bagi HILMI di tengah masyarakat. Disadari atau tidak, imaji FPI yang negatif selama ini karena identik dengan kekerasan berpotensi untuk diredam dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan HILMI selama ini. Selain itu, dengan berulang kali diblokirnya website dan media sosial FPI (Detikcom, 2017), eksistensi situs dan media sosial HILMI menjadi satu-satunya media virtual sayap organisasi FPI di ruang publik virtual masyarakat Indonesia. Meski organisasi induknya, FPI, mengalami penolakan di sejumlah daerah di Indonesia, keterjangkaun situs dan media sosial HILMI ini dalam kampanye penggalangan dana mendapat respon dari publik, diantaranya dari pendukung tim sepakbola Persija Jakarta yang menitipkan bantuan untuk komunitas Rohingya di Myanmar (Hidayatullah, 2018).

Pola dan karakteristik HILMI dalam memaksimalkan sumber daya organisasinya tidak terlepas dari fakta bawa divisi kemanusiaan FPI ini termasuk dalam kategori gerakan sosial yang pada umumnya, tidak saja berjuang melalui jalur non-formal dan non-parlemen, tetapi juga memiliki keterbatasan sumber daya organisasi, termasuk dalam hal ini sumber daya materi atau pendanaan, dan jaringan (McCarthy & Zald, 1977:40). Untuk itu, strategi-strategi non-konvensional dan non-formal untuk mendapatkan sumber daya-sumber daya organisasi perlu dioptimalkan, seperti misalnya penggalangan dana kemanusiaan melalui media sosial, akses untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina dan Myanmar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu peran Ali al-Hamid sebagai Ketua dan *movement entrepreneur* HILMI menjadi sangat penting untuk menentukan keberlanjutan divisi kemanusiaan FPI ini di masa yang akan datang.

## Kesimpulan

Dengan pendekatan gerakan sosial, artikel ini telah membahas HILMI sebagai sayap organisasi FPI yang aktivitasnya berkecimpung dalam bidang sosial-kemanusiaan dan tanggap bencana. Keberadaan dan sepak terjang HILMI dalam konteks menjamur dan meningkatnya

semangat ke-Islaman masyarakat Indonesia di ruang publik dalam dua dekade terakhir ini menjadi unik karena HILMI bukanlah lembaga yang secara profesional dapat disandingkan dengan lembaga-lembaga pengelola zakat atau sedekah profesional pada umumnya seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat. Dilihat dari aspek profesionalisme pengelolaan organisasi, HILMI tertinggal jauh dibandingkan dengan kedua lembaga tersebut dan lembaga-lembaga serupa lainnya. Posisi dan eksistensi HILMI dikatakan unik karena lembaga ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari FPI yang dikenal oleh publik Indonesia sebagai gerakan Islam yang radikal sekaligus identik dengan kekerasan serta mencerminkan karakteristik sebagai gerakan sosial yang terlibat secara berkelanjutan dalam aksi-aksi kolektif yang menentang atau mengkritisi pemerintah beserta jajarannya dan kelompok-kelompok lain yang dianggap merugikan kepentingan gerakan tersebut. Ciri khas gerakan sosial yang melekat pada HILMI dan membedakannya dengan karakteristik lembaga-lembaga pengelola zakat atau sedekah profesional tersebut di atas adalah minimnya sumber daya organisasi yang dimiliki HILMI, termasuk dalam hal ini sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa umumnya gerakan sosial menggunakan bentuk-bentuk aksi kolektif yang dapat mengundang perhatian publik dan peliputan media seperti protes massa, pertemuan akbar, pernyataan pers, dan lain sebagainya sebagai strategi perjuangannya ketimbang melalui aktivitas lobi politik di tingkat lembaga legislatif maupun parlemen (Zald & McCarthy, 1987).

Secara organisasi, HILMI banyak dipengaruhi oleh karakteristik organisasi FPI yang informal, fleksibel, dan kurang terorganisir dengan baik. HILMI masih banyak menggantungkan diri kepada FPI sebagai organisasi induknya dalam hal sumber daya organisasi. Keberadaan relawan Laskar Pembela Islam (LPI) sebagai ujung tombak implementasi aktivitas-aktivitas sosial-kemanusiaan dan tanggap bencana sangat membantu HILMI di lapangan. Potensi inilah yang ditangkap oleh pemerintahan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bekerjasama dengan HILMI guna menutup kekurangan kapasitas negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi warganya yang diantaranya dilakukan melalui kerjasama “Bedah Rumah” dengan Kementerian Sosial ketika itu. Pola kerjasama tersebut sebenarnya lebih dikategorikan sebagai upaya merangkul FPI agar bersedia menjadi partner taktis pemerintah dan untuk meminimalkan aksi-aksi kolektif yang menjadikan pemerintah sebagai targetnya.

Namun, pola pendekatan akomodasionis tersebut tidaklah sikap yang selalu digunakan oleh pemerintahan di era reformasi, karena pemerintahan yang satu dengan yang lain memiliki cara pandang atau pendekatan yang berbeda terhadap FPI. Kebijakan yang berbeda misalnya dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo yang enggan untuk menerapkan politik akomodasi terhadap FPI dengan konsekuensi ketidakharmonisan yang meruncing dengan indikasi serangkaian “Aksi Bela Islam”. Keadaan ini diperburuk dengan suhu politik yang meningkat menjelang Pemilu 2019 lalu dengan FPI yang secara sadar memobilisasi dukungan untuk pasangan kandidat Prabowo-Sandiaga. HILMI sebagai sayap organisasi FPI, tentu saja, mewarisi karakteristik FPI dalam banyak hal, dan posisi FPI yang bersedia berpartisipasi dalam pilkada dalam bentuk dukungan kepada kandidat kepala daerah tertentu yang bersedia mendukung visi misi FPI, menjadi rentan bagi HILMI sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan secara politik oleh setiap elit politik di tanah air demi kepentingan politiknya.

Penelitian lanjutan terhadap HILMI ini ke depan selayaknya dapat dilakukan untuk lebih mengaitkannya dengan literatur-literatur mengenai organisasi filantropi Islam di dunia ataupun di

Indonesia, karena studi mengenai organisasi filantropi Islam, khususnya di Indonesia, telah meningkat secara kuantitas dalam kurun waktu beberapa dekade belakangan ini. Selain itu, penelitian ke depan juga perlu menganalisis motivasi yang dimiliki oleh HILMI dalam aktivitas-aktivitas sosial-kemanusiaan dan tanggap bencananya. Betul bahwa, HILMI, sebagaimana FPI, digerakkan oleh misi Islam universal berupa amar ma'ruf nahi munkar. Namun, bagaimana sebetulnya para pengurus dan anggota HILMI memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasi slogan amar ma'ruf nahi munkar tersebut perlu untuk diesplorasi lebih lanjut.

## Referensi

- Adair-Toteff, C. (2005). Max Weber's Charisma. *Journal of Classical Sociology*, 5(2), 189–204.
- Ahnaf, M. I. (2009). Between Revolution and Reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 2(2), 69–85.
- Bagir, Z. A., Cholil, S., Saputro, E., Asyhari, B., Rahayu, M., Tamu, P., & Dwipayana, A. A. G. N. A. (2010). Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia 2010. *Annual Report of Religious Life in Indonesia*.
- Baidhawiy, Z. (2015). Lazizmu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412.
- CNN Indonesia. (2012, December 27). *FPI Demo Kedubes China Terkait Uighur Hari Ini*. FPI Demo Kedubes China Terkait Uighur Hari Ini. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191227075706-20-460234/fpi-demo-kedubes-china-terkait-uighur-hari-ini>
- CNN Indonesia. (2017, December 15). *Maklumat FPI: Warga Wajib Ikut Aksi Bela Palestina di Monas*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171215153350-20-262681/maklumat-fpi-warga-wajib-ikut-aksi-bela-palestina-di-monas>
- Detikcom. (2017, December 22). *Situs dan Akun Medsosnya Bolak-balik Diblokir, FPI Melawan*. <https://news.detik.com/berita/d-3781763/situs-dan-akun-medsosnya-bolak-balik-diblokir-fpi-melawan>
- Dhofier, Z. (1980). *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*.
- Diani, M., & Della Porta, D. (1999). *Social Movements: An Introduction*. Blackwell Publishing Limited.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of contemporary Islam*. Oxford University Press, USA.
- Fauzia, A. (2017). Penolong kesengsaraan umum: The charitable activism of muhammadiyah during the colonial period. *South East Asia Research*, 25(4), 379–394.
- Hasan, A. M. (2018, January 24). Jejak Aksi-Aksi Tolak FPI di Berbagai Daerah. *Tirto*. <https://tirto.id/jejak-aksi-aksi-tolak-fpi-di-berbagai-daerah-cDGT>
- Helmanita, K. (2006). Managing Islamic philanthropy with modern management: the experiences of Dompot Dhuafa. *Islamic Philanthropy and Social Development in Contemporary Indonesia*, 85–118.
- Hidayatullah. (2018, May 22). *Ramadhan, HILMI-FPI Salurkan Bantuan Tahap IV untuk Rohingya di Myanmar*. <https://www.hidayatullah.com/ramadhan/syiar-ramadhan/read/2018/05/22/142906/ramadhan-hilmi-fpi-salurkan-bantuan-tahap-iv-untuk-rohingya-di-myanmar.html>
- Jahroni, J. (2008). *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003*. Silkworm Books.
- Latief, H. (2010). Health Provision for the Poor Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia. *South East Asia Research*, 18(3), 503–553.

- Liddle, R. W. (1996). The Islamic Turn in Indonesia: a Political Explanation. *Journal of Asian Studies*, 613–634.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). Introduction: Opportunities. *Mobilizing Structures, and Framing Processes-Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements*.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- Meyer, D. S., & Minkoff, D. C. (2004). Conceptualizing Political Opportunity. *Social Forces*, 82(4), 1457–1492.
- Munabari, F. (2010). Hizbut Tahrir Indonesia: The Rhetorical Struggle for Survival. In A. Ota, Atsushi, Masaaki, Okamoto, Suaedy (Ed.), *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia* (pp. 173–217). CSEAS Kyoto University, CAPAS Taiwan National University, The Wahid Institute.
- Munabari, F. (2017). Reconciling Sharia with “Negara Kesatuan Republik Indonesia”: The Ideology and Framing Strategies of the Indonesian Forum of Islamic Society (FUI). *International Area Studies Review*, 20(3), 242–263.
- Munabari, F. (2018). The Quest for Sharia in Indonesia: The Mobilization Strategy of the Forum of Islamic society. *Contemporary Islam*, 12(3), 229–249.
- Munabari, F. (2019). *Mendamaikan Syariah & NKRI: Strategi Mobilisasi dan Retorika Gerakan Islam Revivalis Forum Umat Islam (FUI)*. Rajawali Press.
- Munabari, F., Larasati, N. U., Ihsan, R., & Nurhadiyanto, L. (2020). Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State. *Jurnal Politik*, 5(2), 281–312.
- Nisa, E. F. (2018). Social Media and the Birth of an Islamic Social Movement: ODOJ (One Day One Juz) in Contemporary Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 24–43.
- Nurdin, M. R. (2015). Disaster “Caliphization”: Hizbut Tahrir Indonesia, Islamic Aceh, and the Indian Ocean Tsunami. *International Journal of Mass Emergencies & Disasters*, 33(1).
- Rahmat, M. I. (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Erlangga.
- Republika. (2018, October 3). *Relawan FPI Hingga Kenangan Evakuasi Mayat Tsunami Aceh*. <https://www.republika.co.id/berita/pfz2ty385/relawan-fpi-hingga-kenangan-evakuasi-mayat-tsunami-aceh>
- Sakai, M. (2012). Building a Partnership for Social Service Delivery in Indonesia: State and Faith-Based Organisations. *Australian Journal of Social Issues*, 47(3), 373–388.
- Sakai, M. (2010). Growing Together in Partnership: Women’s Views of the Business Practices of an Islamic Savings and Credit Cooperative (Baitul Maal wat Tamwil) in Central Java, Indonesia. *Women’s Studies International Forum*, 33(4), 412–421.
- Slama, M. (2014). Indonesian Hadhramis and the Hadhramaut: An Old Diaspora and Its New Connections. *Antropologi Indonesia*.
- Suprana, J. (2014). *Bersama Ketua Umum FPI Rizqieq Shibab*. TVRI.
- Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. *Cambridge: Cambridge University Press*. DOI: <https://doi.org/10.1017/Cbo9780511813245>.
- Telford, J., & Cosgrave, J. (2007). The International Humanitarian System and the 2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunamis. *Disasters*, 31(1), 1–28.
- Tilly, C. (2004). *Tilly, Charles (2004). Social movement: 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, D. M., Lundry, C., & Amin, A. (2014). The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia. *Contemporary Islam*, 8(2), 153–171.
- Zald, M. N., & McCarthy, J. D. (1987). *Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays*. Transaction Publishers.

### **Wawancara**

Al-Hamid, Ali. (2020). (Ketua DPP HILMI). Jakarta, 20 April 2018.

Bamu'min, Novel (2013). (Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah FPI DKI Jakarta). Jakarta, 1 Juni 2013.

Maarif, Slamet (2013). (Wakil Sekjen DPP FPI). Jakarta, 13 November 2013.

Purnomo, Eko (2018). (Koordinator Lapangan DPP HILMI). Jakarta, 6 April 2018.

Sahroji, Muhammad (2013). (Kepala Sekretariat DPP FPI). Jakarta, 7 September 2013.

Shodiq, Jafar (2013). (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat FPI). Jakarta, 5 Juni 2013.